



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI BATAM
SUB UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI BATAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG HENDRAWAN**
2. Jabatan : **PEMBANTU DIREKTUR II BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **204147**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 572.000.000

1. Tanah Seluas 175 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/21 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/36 m2 di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 32.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 29.913.100**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 864.413.100

III. HUTANG Rp. 299.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 564.913.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.